

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7 UUD Tahun 1945. namun tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sehingga terjadinya *abuse of power* dan Presiden dapat dipilih kembali secara terus menerus tanpa ada batasan periode. Sehingga dilakukan Amandemen Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden, yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali periode. Amandemen dilakukan untuk memberikan *check and balances* dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. *Urgensi* dan pentingnya masa jabatan presiden dan wakil presiden di wacanakan 3 periode untuk menghindari polarisasi dan supaya pembangunan yang tengah berlangsung tidak berhenti ditengah jalan. Wacana tiga periode boleh diterima dan boleh juga di tolak oleh siapa saja karna itu adalah bagian dari dinamika demokrasi sehingga bisa saja menjadi hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*).

B. SARAN

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah mengalami perubahan yang baik terbukti dapat mencegah keotoriteran dan juga kekuasaan tanpa batas dari Presiden sehingga adanya *Check and Balances* dalam lembaga-lembaga negara. Walaupun upaya untuk merubah pembatasan masa jabatan Presiden Dan Wakil Presiden selalu muncul, diharapkan itu tetap berlandaskan pada nilai UUD NRI 1945 yang nantinya dapat menjadikan perubahan yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bagir Manan, 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan Thaib, dkk.2006, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung.
- M. Dimiyati Hartono, 2009, *Problematic Dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Margarito Kamis, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden*, Setara press, Malang.
- Miriam Budiarjo, 1991, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Gramedia Jakarta.
- Moh. Mahfud Md, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4-5
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Jakarta.
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta
- Rendy Adiwilaga, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, CV budi utama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Pengaturan Ekonomi, Kesejahteraan, Kebudayaan, Pendidikan, dan Agama dalam Rangka Amandemen UUD 1945*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Sri Soemantri, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Rosdakarya, Bandung.

_____, 2016, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya sebelum dan sesudah UUD 1945 perubahan*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Susilo Suharto, 2006, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuswalina dan Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

B. Peraturann Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan.

C. Sumber Lain

Ali Noer Zaman, 2020, ' *Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional* ', *Kajian Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020

Bappeda.kaltimprov.go.id, 2021, Proyek Infrastruktur Jokowi yang Tertunda Gegara Corona, 7 Januari pukul 1:39 WIB, <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/proyek-infrastruktur-jokowi-yang-tertunda-gegara-corona>.

Berita Satu.com – 2022, *Ini Alasan Jokpro Dukung Jokowi 3 Periode*, 30 Januari pukul 00:30 WIB, <https://www.beritasatu.com/politik/828075/ini-alasan-jokpro-dukung-jokowi-3-periode>

CNN Indonesia – 2021, *Formappi: Wacana Presiden 3 Periode Pernah Muncul Zaman SBY*, 11 November pukul 20:00 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32-6/zaman-sby>

CNN Indonesia – 2021, *Formappi: Wacana Presiden 3 Periode Pernah Muncul Zaman SBY*, 11 November pukul 20:00 WIB,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32658532/formappi-wacana-presiden-3-periode-pernah-muncul-zaman-sby>

CNN Indonesia "Megawati Wacanakan Kembali GBHN Kekinian" 29 Jan. 22 pukul 17:50 , <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308135754-32-281447/megawati-wacanakan-kembali-gbhn-kekinian>.

Detik.com, 2022 , Didorong Maju di 2024, Ini Pernyataan Jokowi Tolak Usulan 3 Periode, <https://news.detik.com/berita/d-5599364/didorong-maju-di-2024-ini-pernyataan-jokowi-tolak-usulan-3-periode>

Hayatun Na'imah, 2015, 'Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia', Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1 Juni 2015.

<https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/khazanah/article/download/518/402>

Jurnal Hendri F. Isnaeni, Perubahan UUD 1945 adalah tuntutan dan kebutuhan, <http://Hendrifisnaeni.blogspot.com/2008/08/perubahan-uu-1945-adalah-tuntutan-dan-kebutuhan-dan.html>

Koerniatmanto Soetoprawiro, Mei 1998, Konstitusi : pengertian dan Perkembangannya, Pro Justicia ,No 2

Kompas.com – 2021, Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, 11 November pukul 21:10 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode?page=all>

Lawmetha.wordpress.com,2021, Metode Penelitian Hukum Normatif <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

Liputan6.com-2022, Alasan Jokpro Dorong Jokowi 3 Periode,30 Januari pukul 00:30 WIB, <https://www.liputan6.com/news/read/4586209/alasan-jokpro-dorong-jokowi-3-periode>

Mediaindonesia.com, 2021, Resentment, Polarisasi, dan Pilihan Politik, 17 Januari pukul 1:12 WIB, <https://mediaindonesia.com/kolompakar/430551/resentment-polarisasi-dan-pilihan-politik>

Narasi Newsroom Mata najwa- 2022, ' Gaduh Tiga Periode', 29 Januari , pukul 00: 16 WIB https://www.youtube.com/watch?v=mNnEHgLXw_c

Panmohamadaiz.com,2021, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia,
[https://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/201508 / sistem pemerintahan- indonesia-masa-orde-lama.html](https://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/201508/sistem-pemerintahan-indonesia-masa-orde-lama.html)

Slideshare.net,2021,Pelaksanaan sistem Pemerintahan Di Indonesia
[https://www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-sistem pemerintahan-di-indonesiaeric - presentation](https://www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-sistem-pemerintahan-di-indonesiaeric-presentation)

Tempo.com, 2022, Rencana MPR Menghidupkan GBHN Menuai Pro Kontra , 29 Jan. 22 pukul 15:00 WIB [https://fokus.tempo.co/read/1232010/rencana-mpr-menghidupkan-gbhn-menuai -pro-kontra/full&view=ok](https://fokus.tempo.co/read/1232010/rencana-mpr-menghidupkan-gbhn-menuai-pro-kontra/full&view=ok).

Tirto.id, "Menakar Kekuatan Oposisi Jokowi di DPR 2019-2024",29 Jan. 22 pukul 23:33 WIB <https://tirto.id/menakar-kekuatan-oposisi-jokowi-di-dpr-2019-2024-d9gA>